

# BAB I PENDAHULUAN

## **A. Latar Belakang Masalah**

Terhitung sejak reformasi digulirkan, pendidikan juga turut dituntaskan. Ada banyak perubahan yang dilakukan demi memperbaiki mutu pendidikan, salah satunya sistem kurikulum pendidikan. Kurikulum idealnya adaptif dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan serta teknologi. Tujuannya agar lulusan pendidikan memiliki kemampuan yang relevan dengan kebutuhan pengguna dan tantangan zaman. Transformasi kurikulum menjadi hal yang biasa terjadi di berbagai berbagai negara, salah satunya Indonesia.

Pendidikan tinggi merupakan suatu wadah untuk mencetak intelektual yang terampil, memiliki dedikasi yang tinggi, bisa menghadapi kemajuan Iptek dan Imtaq. Perguruan tinggi adalah institusi yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar dalam rangka mempersiapkan peserta didik menjadi sosok pemimpin di masa mendatang. Dalam hal ini bukan saja agar mereka menjadi sosok intelektual yang mumpuni namun di samping itu juga sosok manusia yang mempunyai moralitas tinggi.

Perguruan Tinggi sebagai salah satu elemen dalam Sistem Pendidikan Nasional mempunyai tanggungjawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan visi Indonesia 2030 untuk menciptakan masyarakat yang maju, sejahtera, mandiri

dan berdaya saing tinggi. Untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki daya saing tinggi dalam kancah internasional, Perguruan Tinggi termasuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dituntut untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas serta mampu memberikan tawaran solusi terhadap berbagai masalah kemanusiaan dan kebangsaan (Tilaar, 1998). Perkembangan PTKI dengan istilah yang sebelumnya digunakan yaitu Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) secara kuantitatif mengalami peningkatan. Keberadaan Perguruan Tinggi termasuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) mempunyai kedudukan dan fungsi penting dalam perkembangan suatu masyarakat (Muhaimin, 2015).

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebagai lembaga pendidikan tinggi yang diakui eksistensinya dalam Sistem Pendidikan Nasional mempunyai tanggung jawab dalam mendukung pembangunan di Indonesia (Daulay, 2014). Berdasarkan tujuan pendidikan tinggi sebagaimana diatur dalam PP 60 Tahun 1999 dan misi Kementerian Agama, maka secara konstitusional tujuan Pendidikan Tinggi Islam antara lain; Pertama, Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan atau memperkaya khazanah ilmu, teknologi, seni dan atau kebudayaan yang bernafaskan Islam. Kedua, Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang bernafaskan Islam dan atau kebudayaan Islam untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat serta memperkaya kebudayaan nasional. Ketiga, Merumuskan, menyebarluaskan dan mendidikkan filosofi dan nilai-nilai agama Islam sehingga dapat

digunakan oleh masyarakat sebagai parameter perilaku kehidupan, menjadi inspirator dan katalisator pembangunan, serta motivator terciptanya toleransi kehidupan beragama, serta kehidupan yang harmonis antar umat yang berbeda agama.

Persoalan yang muncul seputar penyelenggaraan pendidikan tinggi, sebagaimana kritik banyak pihak berkisar pada kualitas, potensi, sistem, etos kerja, pendanaan, sarana pendukung, atau persoalan yang berkaitan dengan fungsi dan perannya dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM) atau lulusan. Kritik tersebut merupakan indikator untuk menentukan standar kualitas perguruan tinggi. Dari beberapa persoalan-persoalan utama yang dihadapi perguruan tinggi tersebut, ada persoalan yang memerlukan pemecahan yang bersifat segera, antara lain; mutu lulusan yang berkarakter dan sumbangan perguruan tinggi terhadap pengembangan keilmuan. Secara kuantitas, lulusan perguruan tinggi sudah cukup besar. Secara kualitas kondisinya masih jauh dari memuaskan. Mutu lulusan masih dianggap belum memenuhi harapan masyarakat. Keluhan seperti ini meliputi berbagai hal, mulai dari kompetensi yang paling dasar sampai profesionalitas mereka dalam melakukan pekerjaan. Sehingga pada akhirnya masih banyak lulusan yang belum/ tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, dan pada akhirnya banyak di antara mereka yang masih menganggur.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa untuk mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kecerdasan, kepribadian dan akhlak mulia sudah dilakukan dengan berbagai cara. Pengembangan kecerdasan dapat diperoleh melalui sekolah baik formal maupun non formal yang ditunjukkan dengan angka/nilai yang diperoleh peserta didik yang sangat didominasi

dengan ranah kognitif semata. Sementara itu tentang kepribadian dan akhlak mulia masih belum banyak diterapkan dalam pembelajaran untuk tiap-tiap mata pelajaran/mata kuliah, yang dimungkinkan sebagai salah satu penyebab rendahnya kualitas lulusan.

Rendahnya kualitas lulusan dapat disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya adalah ketidaksinkronan/kesenjangan program antara lembaga pendidikan (termasuk Perguruan Tinggi) dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Kesenjangan tersebut dikarenakan oleh sistem pembelajaran yang diterapkan di Perguruan Tinggi saat ini masih berorientasi pada *hard skill* yakni menyiapkan peserta didik yang cerdas keilmuan, cepat lulus dan segera mendapat pekerjaan. Sementara itu pembelajaran yang berorientasi pada kreativitas, inovatif, mandiri, jujur, disiplin, kerja keras, toleransi dan saling menghargai (pembelajaran berorientasi karakter) belum banyak diterapkan.

Dewasa ini upaya peningkatan mutu pendidikan terus dilakukan oleh berbagai pihak dan pendekatan. Upaya-upaya tersebut dilandasi suatu kesadaran betapa pentingnya peranan pendidikan dalam pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan watak bangsa (*Nation Character Building*) untuk kemajuan masyarakat dan bangsa. Harkat dan martabat suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas pendidikannya. Dalam konteks bangsa Indonesia, peningkatan mutu pendidikan merupakan sasaran pembangunan di bidang pendidikan nasional dan merupakan bagian integral dari upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia secara menyeluruh (Mulyasa, 2005: 31).

Menurut Abdul Hadis dan Nurhayati (2010: 85) mutu pendidikan merupakan tolak ukur keberhasilan sebuah proses pendidikan yang bisa dirasakan oleh masyarakat mulai dari *input* (masukan), proses pendidikan yang terjadi, hingga *output* (produk keluaran) dari sebuah proses pendidikan.

Menurut H. A. R. Tilaar (2012: 224-225) Indonesia dewasa ini dirasakan kemerosotan rasa nasionalisme oleh kekuatan-kekuatan global. Lunturnya nasionalisme disebabkan: 1) Globalisasi yang mengembangkan demokrasi serta hak-hak asasi manusia telah terbentuk menjadi etnosentrisme yang sempit, bahkan melahirkan sentimen yang mementingkan golongan; 2) Euforia kebebasan yang memicu disintegrasi bangsa; 3) Orang lebih memilih mengonsumsi produk dan jasa dari luar negeri; 4) Menyerahkan pengelolaan sumber daya ekonomi kepada modal asing.

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dikemukakan di atas, salah satu faktor yang sering dijadikan sasaran penyebab dan kurang berhasilnya perguruan tinggi dalam mencapai tujuan pokok yang termaktub dalam PP. No. 60 tahun 1999 adalah faktor kurikulum. Mengingat, kurikulum merupakan rencana pendidikan yang akan diberikan kepada mahasiswa. Bahkan dalam pengertian yang lebih luas, keberadaan kurikulum tidak saja terbatas pada materi yang akan diberikan di dalam ruang kuliah, melainkan juga meliputi apa saja yang sengaja diadakan atau ditiadakan untuk dialami mahasiswa di dalam kampus (Hamalik, 2007: 4). Oleh karena itu, posisi kurikulum sebagai mata rantai yang urgen dan tidak dapat begitu saja dinafikan dalam konteks peningkatan kualitas perguruan tinggi (Furchan, 2007: 1).

Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan, para pelaku pendidikan memerlukan adanya acuan yang jelas sebagai pedoman dari pelaksanaan proses pendidikan, yang dinamakan kurikulum. Acuan tersebut terdiri dari komponen tujuan yang menjadi arah pendidikan, dan komponen evaluasi (Wina Sanjaya, 2008: 16).

Selain itu, pendidikan yang dilaksanakan pada Perguruan Tinggi sekarang juga merekomendasikan perlunya penyempurnaan konsep dasar kurikulum dan selanjutnya dilaksanakan dengan taat asas. Kurikulum Perguruan Tinggi harus mampu mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi berbagai persaingan di dunia global dan perubahan masyarakat pada masa yang akan datang.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk mengkaji tentang Transformasi Kurikulum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Berbasis KKNi dalam Pengembangan Mutu Pendidikan.

## **B. Rumusan Masalah**

Bertolak dari latar belakang masalah di atas, maka fokus utama penelitian ini adalah tentang Transformasi Kurikulum Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Berbasis KKNi, kemudian melihat bagaimana implementasinya dalam pengembangan mutu pendidikan. Untuk lebih fokus lagi, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah konsep dan proses transformasi kurikulum PTKI berbasis KKNi?
2. Bagaimanakah sistem pendidikan dalam pengembangan kurikulum pada PTKI Indonesia?
3. Bagaimanakah pengembangan mutu pendidikan pada PTKI berbasis KKNi?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses internalisasi nilai pendidikan karakter dalam pendidikan, kemudian melihat apa relevansinya dalam pendidikan Islam pada PTKIN Indonesia. Secara lebih rinci adalah bertujuan:

1. Untuk mendapatkan konsep dan proses transformasi kurikulum PTKI berbasis KKNI!
2. Untuk mengetahui sistem pendidikan dalam pengembangan kurikulum pada PTKIN Indonesia!
3. Untuk mengetahui proses pengembangan mutu pendidikan pada PTKI dengan kurikulum berbasis KKNI!

### **D. Manfaat Penelitian**

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk menghasilkan suatu model, pendekatan atau metode baru tentang proses transformasi kurikulum pada PTKIN dalam pengembangan mutu pendidikan secara umum, dan dunia pendidikan Islam secara khusus, yang dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan keilmuan perspektif pendidikan nilai. Sumbangan keilmuan tersebut bisa berupa penguatan terhadap beberapa model pengembangan kurikulum yang sudah dicetuskan oleh para ahli atau bahkan yang telah dicetuskan oleh pemerintah, atau bahkan bisa memunculkan suatu model baru.

Sedangkan secara praktis, dengan ditemukan model, pendekatan atau metode tersebut sehingga dapat digunakan untuk membantu praktisi pendidikan dalam mengimplementasikan ide-idenya kepada peserta didik, serta dapat menjadi pijakan dan acuan di dalam memperbaiki dan mengembangkan kurikulum berbasis

kurikulum KKNI dalam pengembangan mutu pendidikan Islam di Indonesia.

### **E. Kajian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian yang relevan antara lain penelitian yang dilaksanakan oleh Mukhidin, Mustika (2014) dapat disimpulkan bahwa Program Studi Pendidikan Teknologi Agroindustri diharuskan mengembangkan kurikulum berbasis KKNI sehingga memiliki dokumen kurikulum program studi yang dapat mengikuti perkembangan IPTEK juga tuntutan kehidupan global. Pengembangan kurikulum pendidikan teknologi agroindustri dilakukan dalam beberapa tahap yaitu: (1) perumusan profil lulusan melalui analisis SWOT juga *tracer study*; (2) perumusan *learning outcome* (capaian pembelajaran) program studi mengacu pada KKNI; (3) perumusan bidang kajian dan kedalaman mata kuliah; (4) penyusunan struktur kurikulum dan silabus ke dalam dokumen kurikulum Program Studi Pendidikan Teknologi Agroindustri.

Penelitian oleh Ayu Woro Wigati (2015) yang berisi tentang upaya yang dilakukan Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam menyiapkan lulusan yang berkompeten sesuai KKNI, serta faktor-faktor yang menjadi penunjang dan penghambatnya. Sedangkan penelitian oleh Ali Akbah Jono (2016) yang berisi tentang rekonstruksi pengembangan kurikulum pada Prodi Pendidikan Bahasa Inggris di LPTK. Penelitian ini menghasilkan gambaran tentang mekanisme perubahan dan pengembangan kurikulum yang dilakukan selama ini tidak standar berdasarkan analisis kebutuhan (*need analisis*). Disamping itu, pihak sebagai



pelaku dan pengelola pengembangan kurikulum belum memiliki standar pengembangan kurikulum secara tertulis (permanen) dalam melakukan upaya pengembangan kurikulum dalam rangka menjembatani keinginan, kebutuhan serta harapan semua pihak.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Pendidikan Karakter**

Secara etimologi, bila ditelusuri dari asal katanya, kata karakter berasal bahasa Latin "*kharakter*", "*kharassein*", "*kharax*", yang berarti membuat tajam dan membuat dalam (Madjid dan Andayani, 2011: 11). Secara terminologi, karakter dimaknai sebagai cara berpikir dan berperilaku yang khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Karakter dapat dianggap sebagai nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia. Lingkungan dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, adat-istiadat, dan estetika. Karakter adalah perilaku yang tampak dalam kehidupan sehari-hari baik dalam bersikap maupun dalam bertindak (Samani dan Hariyanto, 2017: 41). Zubaedi (2015: 8) menjelaskan bahwa karakter merupakan keseluruhan disposisi kodrati dan disposisi yang telah dikuasai secara stabil yang mendefinisikan seorang individu dalam keseluruhan tata perilaku psikisnya yang menjadikannya tipikal dalam cara berpikir dan bertindak.

Syarkawi (2006: 11) menjelaskan bahwa ada yang menganggap bahwa karakter sama dengan kepribadian.

Kepribadian dianggap sebagai ciri atau karakteristik atau gaya atau sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan, misalnya keluarga pada masa kecil, dan juga bawaan seseorang sejak lahir. Karakter dipengaruhi oleh hereditas (keturunan). Perilaku seseorang anak seringkali tidak jauh dari perilaku orang tuanya. Karakter juga dipengaruhi oleh lingkungan. Menurut Zubaedi (2015: 10), anak yang berada di lingkungan yang baik, cenderung akan berkarakter baik, demikian juga sebaliknya. Karakter mengacu pada serangkaian sikap (*attitudes*), perilaku (*behaviors*), motivasi (*motivations*), dan keterampilan (*skills*).

Mengacu pada berbagai pengertian karakter di atas, maka karakter dapat dimaknai sebagai nilai dasar yang mempengaruhi pribadi seseorang, baik karena pengaruh hereditas maupun lingkungan, dan terwujud dalam sikap dan perilaku sehari-hari yang membedakannya dengan orang lain. Sedangkan pendidikan karakter menurut Zubaedi (2015: 15) adalah usaha sengaja (sadar) untuk mewujudkan kebajikan, yaitu kualitas kemanusiaan yang baik secara objektif, bukan hanya baik untuk individu perseorangan, tetapi juga baik untuk masyarakat secara keseluruhan. Pendidikan karakter dimaknai sebagai pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai karakter pada peserta didik sehingga mereka memiliki nilai karakter sebagai karakter dirinya, menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dirinya sebagai anggota masyarakat warga negara yang relegius, nasionalis, produktif, dan kreatif (Judiani, 2010: 282).

Menurut David Elkind dan Freddy Sweet dalam Zubaedi (2015: 15), pendidikan karakter adalah usaha sengaja (sadar) untuk

membantu manusia memahami, peduli tentang, dan melaksanakan nilai-nilai etika inti. Sedangkan Raharjo (2010: 17) memaknai pendidikan karakter sebagai suatu proses pendidikan secara holistik yang menghubungkan dimensi moral dengan ranah sosial dalam kehidupan peserta didik sebagai pondasi bagi terbentuknya generasi yang berkualitas yang mampu hidup mandiri dan memiliki prinsip suatu kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan.

Lickona (1996) mendefinisikan pendidikan karakter sebagai upaya yang sungguh-sungguh untuk membantu seseorang memahami, peduli, dan bertindak dengan landasan inti nilai-nilai etis. Sedangkan menurut Scerenko, pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai upaya yang sungguh-sungguh dengan cara di mana ciri kepribadian positif dikembangkan, didorong, dan diberdayakan melalui keteladanan, kajian (sejarah dan biografi para bijak dan pemikir besar), serta praktek emulasi (usaha yang maksimal untuk mewujudkan hikmah dari apa-apa yang diamati dan dipelajari).

Artinya, pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter pada peserta didik yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi Insan Kamil. Dengan demikian, maka pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai usaha sadar dan terencana dalam menginternalisasikan nilai-nilai karakter sehingga karakter tersebut dapat dimengerti, dihayati dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh peserta didik.

## 2. Kurikulum Berbasis KKNI

Kurikulum sebagai arah yang berfungsi mengarahkan proses belajar mengajar tujuan yang ingin dicapai oleh perguruan tinggi serta perubahan yang dinamis, maka kurikulum suatu perguruan tinggi perlu dinilai dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Bondi Wiles Damayati dan Mudjiono mengemukakan bahwa pengembangan kurikulum yang terbaik adalah proses yang meliputi banyak hal yaitu; (1) Kemudahan suatu analisis tujuan, (2) rancangan suatu program, (3) penerapan serangkaian pengalaman yang berhubungan, dan (4) peralatan dan evaluasi proses.

Kurikulum pada hakikatnya adalah suatu program yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai sejumlah tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum dikembangkan dengan meliputi komponen-komponen kurikulum yang membentuk sistem kurikulum itu sendiri, yaitu komponen: tujuan, bahan, metode, peserta didik, pendidik, media, lingkungan, sumber belajar, dan lain lain. Komponen-komponen kurikulum tersebut harus dikembangkan agar tujuan pendidikan dapat dicapai sebagaimana mestinya (Idi, 2014:14).

Schubert (1986) menjelaskan bahwa pengembangan kurikulum sangat penting, karena akan sangat menentukan jenis dan kualitas pengetahuan dan pengalaman yang memungkinkan seseorang dapat mencapai kehidupan dan penghidupan yang baik. Hal tersebut senada dengan pendapat Bobbit (1918), bahwa kurikulum harus dikembangkan dan disesuaikan dengan kecakapan-kecakapan yang harus dicapai.

Amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pada Pasal 35 ayat 2 dinyatakan bahwa

Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012, merupakan pernyataan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang penjenjangan kualifikasinya didasarkan pada tingkat kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (*learning outcomes*).

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) merupakan perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait sistem pendidikan nasional yang memungkinkan hasil dari sebuah pendidikan tinggi yang dilengkapi dengan perangkat yang memudahkan dalam melakukan penyepadanan dan penyejajaran dengan hasil pendidikan bangsa lain di dunia (DIKTI, 2014). Fungsi adanya KKNI terletak pada penyetaraan diseluruh bidang dan sektor sistem pendidikan tinggi yang terdapat dalam pelaksanaan kurikulum pendidikan tinggi.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) memberikan parameter ukur berupa jenjang kualifikasi dari jenjang 1 terendah sampai jenjang 9 tertinggi. Setiap jenjang KKNI bersepadan dengan level Capaian Pembelajaran (CP) program studi pada jenjang tertentu, yang mana kesepadannya untuk pendidikan tinggi adalah level 3 untuk D1, level 4 untuk D2, level 5 untuk D3, level 6 untuk D4/S1, level 7 untuk profesi (setelah sarjana), level 8 untuk S2, dan level 9 untuk S3. CP pada setiap level KKNI diuraikan dalam diskripsi sikap dan tata nilai, kemampuan, pengetahuan, tanggung jawab dan hak dengan pernyataan yang ringkas yang

disebut dengan deskriptor generik. Masing masing deskriptor mengindikasikan kedalaman dan level dari CP sesuai dengan jenjang program studi.

Regulasi lain adalah adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Ada beberapa hal yang harus dicermati terkait dengan regulasi ini, terutama pada bab II Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan dan standar sarana dan prasarana pembelajaran.

Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI. Standar isi pembelajaran mensyaratkan untuk S1 adalah menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan secara mendalam.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau disingkat KKNI merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka memberikan pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor (Tim, 2014: 11). Hal

tersebut termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Selain itu, KKNI juga merupakan perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional dan pelatihan yang dimiliki oleh bangsa ini. Dengan demikian, dapat dimaknai bahwa KKNI merupakan sebuah sarana yang memungkinkan hasil pendidikan, khususnya pendidikan tinggi dengan mudah dapat melakukan penyepadanan dan penyejajaran dengan hasil pendidikan bangsa lain di belahan dunia. Selain itu, melalui penerapan KKNI hanya SDM yang berkualifikasi yang dapat masuk dan bekerja di Indonesia. Melalui fungsi yang komprehensif tersebut, menjadikan KKNI berpengaruh pada setiap bidang dan sektor di mana sumber daya manusia dikelola, termasuk di dalamnya pada sistem pendidikan tinggi, terutama pada aspek kurikulum (Tim, 2014: 11).

Selain itu, dalam KKNI dinyatakan Sembilan kualifikasi SDM Indonesia yang produktif yang secara komprehensif mempertimbangkan dua sisi penting relevansi pendidikan dan pelatihan yaitu kebutuhan kompetensi kerja (*job competency*) dalam ranah dunia kerja serta capaian pembelajaran yang dihasilkan oleh suatu proses pendidikan (Dirjen Dikti, 2010: 5).

Deskriptor setiap jenjang kualifikasi yang merupakan paduan antara kompetensi kerja dan capaian pembelajaran juga disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, perkembangan sektor-sektor pendukung perekonomian dan kesejahteraan rakyat seperti perindustrian, pertanian, kesehatan, hukum dan aspek lain yang terkait serta aspek-aspek pembangun jati diri bangsa yang tercermin dalam *Bhineka Tunggal*

*Ika*, yaitu komitmen untuk tetap mengakui keragaman agama, suku, budaya, bahasa, dan seni yang tumbuh dan berkembang di Indonesia.